

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



DISUSUN OLEH :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jalan Polisi Militer Nomor 2 Telepon (0380) 833462, 832975

[www. http://bappelitbangda.nttprov.go.id/](http://bappelitbangda.nttprov.go.id/) e-mail: nttbappelitbangda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 merupakan perwujudan dari tingkat pencapaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT secara utuh selama perjalanan Tahun 2021, berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 maupun dalam Perjanjian Kinerja dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Kupang, Februari 2022
Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


[Signature]
Kosmas D. Lana, SH., M.Si
Pemimpin Utama Madya
NIP. 196509271990111004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud & Tujuan	2
1.3. Dasar Penyusunan	3
1.4. Gambaran Umum Bappelitbangda Provinsi NTT	3
1.5. Sumber Daya Manusia (ASN) Bappelitbangda Provinsi NTT	8
1.6. Permasalahan & Isu Strategis	12
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1. Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023	15
2.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	15
2.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Provinsi NTT	18
2.4. Strategis dan Arah Kebijakan	21
2.5. Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi	37
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	37
B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021	38
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	40
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra-P Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023.....	42
E. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja	45
F. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021	48
3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja	51
3.2. Akuntabilitas Keuangan	58
3.2.1. Analisis Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari APBD TA. 2021.....	58
A. Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	59
B. Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	65
C. Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	65

BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Tindak Lanjut	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan Jenis kelamin	8
Tabel 1.2	ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.3	ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/golongan.....	10
Tabel 1.4	ASN Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan Jabatan Struktural	10
Tabel 1.5	ASN Bappelitbangda Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	11
Tabel 2.1	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur	17
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018–2023	19
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2018–2023	21
Tabel 2.4	Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU	24
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan 2021 Bappelitbangda Provinsi NTT	27
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahunan 2021 Bappelitbangda Provinsi NTT	34
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	38
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021.....	39
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra-P Tahun 2018-2023.....	42
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja.....	45
Tabel 3.5	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021.....	49
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran APBD TA. 2021	59
Tabel 3.7	Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	60
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	65
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah di tingkat Provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT.

Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi NTT harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka penilaian penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Bappelitbangda wajib melaporkan kinerja instansi tahunan yang pengukuran kinerjanya berpijak pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Bappelitbangda Provinsi NTT. Laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban Bappelitbangda Provinsi NTT untuk melaporkan kinerja instansi untuk Tahun Anggaran 2021.

1.2. Maksud & Tujuan

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pencapaian hasil pelaksanaan dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah dari Bappelitbangda Provinsi NTT kepada publik dan *stakeholders* terkait dengan harapan dapat memberikan masukan perbaikan dalam upaya peningkatan Kinerja Koordinasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan LKIP ini bertujuan:

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap kebijakan, program dan kegiatan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan upaya pemecahan sebagai umpan balik untuk memperbaiki peningkatan kinerja instansi pemerintahan di masa yang akan datang;
3. Sebagai masukan data dan informasi dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022; dan
4. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Dasar Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT;

1.4. Gambaran Umum Bappelitbangda Provinsi NTT

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar aparatur sipil yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

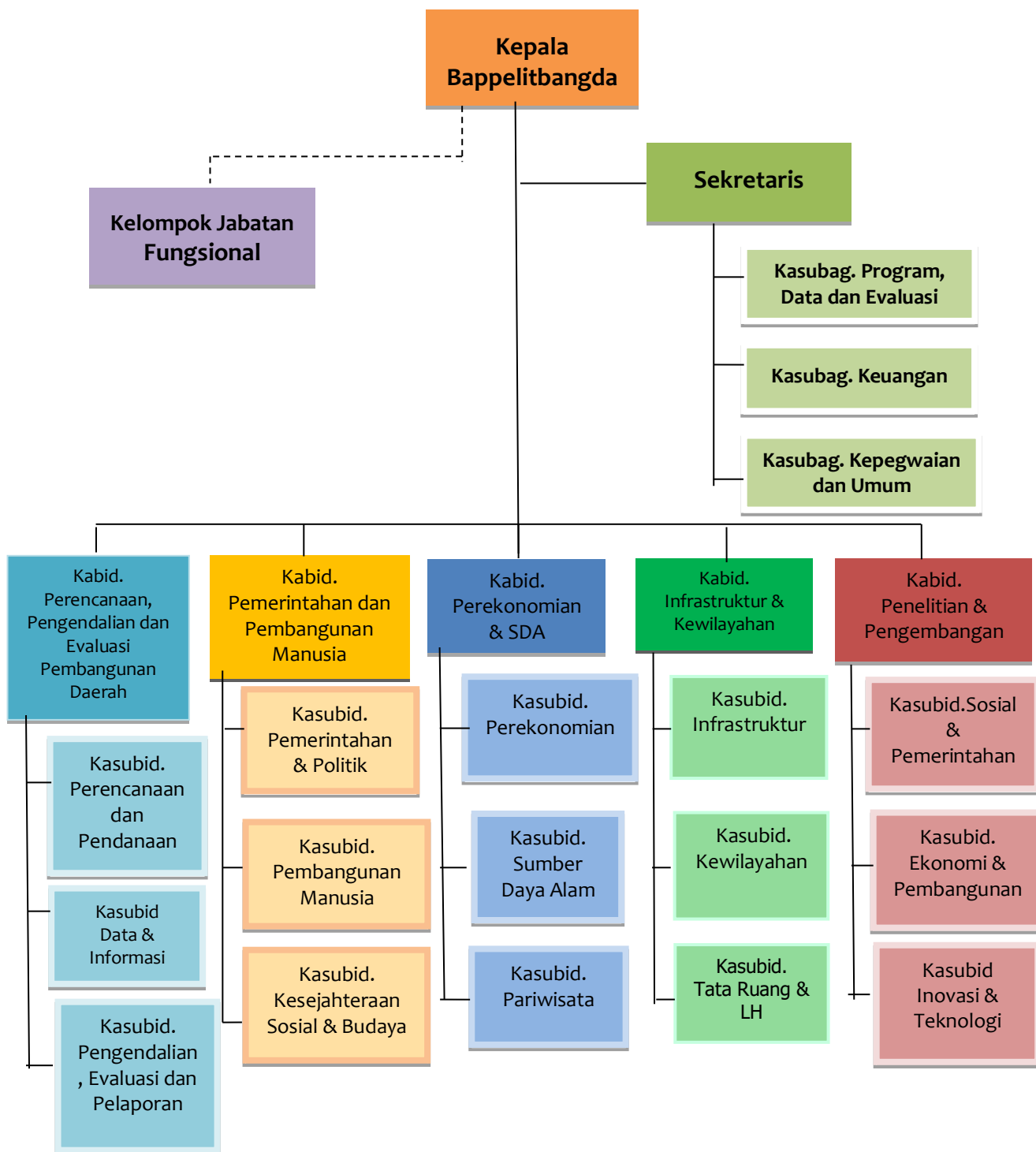
a. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Susunan organisasi perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi:

- a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahi 3 Sub Bidang:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi 3 Sub Bidang:
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya.
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi 3 Sub Bidang:
- a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Pariwisata.
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahi 3 Sub Bidang:
- a. Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Kewilayahan;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi 3 Sub Bagian:
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Provinsi NTT



b. Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Merumuskan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi Kesekretariatan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis yang Partisipatif dan Berkesinambungan.

2. Sekretaris.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Pelayanan Administratif yang Cepat, Tepat dan Lancar.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, Serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meliputi Pemerintahan dan Politik, Pembangunan Manusia, Serta Kesejahteraan Sosial dan Budaya Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Agar Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perekonomian, sumber daya alam dan pariwisata berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan infrastruktur dan kewilayahan meliputi infrastruktur, kewilayahan serta tata ruang dan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan

7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi social dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi serta tersedianya bank data dan rekomendasi hasil kelitbangan dalam rangka pembangunan daerah.

1.5. Sumber Daya Manusia (ASN) Bappelitbangda Provinsi NTT

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan Tahun 2020 didukung oleh jumlah ASN Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-Bidang. Tabel berikut memberi gambaran perkembangan dan potensi sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, sebagai berikut:

Jumlah ASN Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 112 orang, terdiri dari : Laki-laki 68 orang, Perempuan 44 orang dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
PNS Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah PNS (org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat	21	9	30
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7	9	16
3	Bidang Perekonomian dan SDA	7	6	13

No	Uraian	Jumlah PNS (org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	8	4	12
5	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10	7	17
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	15	9	24
	JUMLAH	68	44	112

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Untuk tingkat pendidikan PNS Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) dan hanya 1 orang yang berpendidikan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di lingkup Bappelitbangda Provinsi NTT memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar PD Lingkup Provinsi NTT. PNS Bappelitbangda berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

PNS Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)							Jmlh
		S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	
1	Sekretariat	-	5	10	2	12	1	-	30
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5	9	0	2	-	-	16
3	Bidang Perekonomian dan SDA	0	4	6	1	2	-	-	13
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	1	3	6		2			12
5	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	6	9	1	1	-	-	17
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	8	15	-	1	-	-	24
	TOTAL	1	31	55	4	20	1	-	112

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan, PNS pada Bappelitbangda Provinsi NTT, secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.3

PNS Bappelitbangda Provinsi NTT berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
4	Pembina (IV/a)	13
5	Penata Tingkat I (III/d)	22
6	Penata (III/c)	20
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	33
8	Penata Muda (III/a)	4
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
10	Pengatur (II/c)	1
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
12	Pengatur Muda (II/a)	4
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
TOTAL		112

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Berdasarkan Jabatan Struktural Bappeda Provinsi NTT terdapat 21 jabatan struktural, terdiri dari Eselon II A, III A, dan IV A, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4

Tabel PNS Bappelitbangda Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Eselon	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bappelitbangda	II A	1	-	1	
2	Sekretaris	III A	1	-	1	
3	Kepala Bidang	III A	3	2	5	
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	IV A	11	6	17	Kasubag Keuangan belum terisi
TOTAL		-	16	8	24	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

Selain jabatan struktural, terdapat jabatan fungsional yang berperan mengembangkan profesionalisme berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.5
Tabel PNS Bappelitbangda Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Analisis Laporan Keuangan	1	1	2
2.	Bendahara Pengeluaran APBD	1	-	1
3.	Bendahara Pengeluaran APBN	-	1	1
4.	Analisis Verifikator Keuangan	1	-	1
5.	Pengelola Keuangan	-	1	1
6.	Pengadministrasian Keuangan	1	-	1
7.	Arsiparis/ Penyelia	-	1	1
8.	Analisis Layanan Umum	3	-	3
9.	Pengelola Kepegawaian	-	1	1
10.	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	-	1
11.	Pengadministrasian Persuratan	-	2	2
12.	Pengadministrasian Umum	5	1	6
13.	Pengemudi	2	-	2
14.	Analisis Data dan Informasi	1	-	1
15.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
16.	Perencana	3	4	7
17.	Analisis Perencanaan	8	15	23
18.	Pranata Humas Madya	0	-	0
19.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	4	2	6
20.	Pengolah Data	1	1	2
21.	Peneliti	9	2	11
22.	CPNS	1	2	3
23.	TUBEL	6	3	9
24.	Diperbantukan	2	-	2
TOTAL		51	39	88

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappelitbangda Provinsi NTT, 2021

1.6. Permasalahan & Isu Strategis

Dalam penetapan Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, Bappelitbangda mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda kedepan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbangda Provinsi NTT pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada secara kuantitas sudah cukup memadai, begitu pula dari segi tingkat pendidikan sebagian besar sarjana. Namun demikian, sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang ada melalui berbagai diklat, baik diklat teknis fungsional, ataupun kursus yang sifatnya umum seperti kursus komputer minimal 20 jam pelajaran per tahun bagi masyarakat dan PNS;
2. Masih kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bappelitbangda Provinsi NTT sehingga terjadi deviasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bappelitbangda;
3. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat barang dan jasa masih kurang;
4. Masih kurangnya perhatian dari bidang-bidang dan sekretariat dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan *up to date* dalam mendukung perencanaan daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan PD dan antar PD dalam mendukung proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial;
6. Masih perlu meningkatkan koordinasi antara Bappelitbangda Provinsi NTT dan Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-NTT;
7. Masih perlu meningkatkan ketersediaan data spasial dan koordinasi antara data spasial dan aspasial;
8. Pandemi *Covid-19* yang berakibat terjadinya perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappelitbangda yang berakibat terhadap *refocusing* alokasi anggaran yang secara langsung berdampak terhadap implementasi pencapaian target dan kinerja;
9. Adanya kesenjangan dalam penerimaan pendapatan daerah yang berimplikasi terhadap tingginya alokasi anggaran yang termuat dalam Dokumen Anggaran tetapi berbanding terbalik dengan realisasi penyerapan anggaran yang diminta ke Kas Daerah (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian Target dan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappelitbangda kedepan. Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Bappelitbangda sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah:

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten /Kota;
2. Perlunya meningkatkan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan dalam upaya mengawal perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
3. Menggunakan *Google Drive* dengan alamat akun databappelitbangda@gmail.com dalam pelaporan kegiatan dan perjalanan dinas, dimana setiap PNS yang melaksanakan tugas dan setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Meningkatkan peran NTT Satu Data termasuk meningkatkan ketersediaan data yang akan mendukung Bappelitbangda dalam proses perencanaan pembangunan ke depan;
5. Dalam menghadapi pandemi *Covid-19*, perencanaan dan penganggaran harus didalami dan dianalisis dengan seksama agar alokasi dana dialokasikan dengan tidak mengganggu implementasi pencapaian target dan realisasi (tidak melakukan *refocusing*);
6. Perlunya meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan yang dapat diaplikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; dan
7. Memberikan kesempatan pada PNS Bappelitbangda untuk mengikuti pelatihan, diklat, dan kursus serta membuat analisis pengembangan Aparatur sehingga alokasi anggaran untuk mengikuti pelatihan, diklat, dan kursus dapat dialokasikan secara tepat dan cermat;
8. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat dan riil terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada pada Kas Daerah dengan mempertimbangkan Prioritas Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| Bab I | Pendahuluan, Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang dilaporkan dan sekilas pengantar lainnya serta singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi; |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen penetapan kinerja); |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja <ul style="list-style-type: none">- Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/Kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.- Disajikan pula akuntabilitas keuangan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. |
| Bab IV | Penutup, Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Bappelitbangda Provinsi NTT sudah mulai melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Adapun fungsi dari Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023 adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, kemudian menterjemahkannya secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Bappelitbangda Provinsi NTT serta tolok ukur pencapaiannya.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 telah berpedoman kepada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi NTT. RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Seluruh program dalam Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mempedomani program prioritas dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

2.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan permasalahan dan isu strategis yang ada, maka untuk periode waktu 2018-2023 merujuk pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD adalah **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

- a. *Bangkit*, mencerminkan suatu tekad yang bulat untuk menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki (Pariwisata sebagai *Prime Mover*) dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan melalui peningkatan indikator

IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;

- b. *Sejahtera*, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda); serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan dengan indikator yang terukur; dan
- c. *Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia, maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, maka dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. *Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil:*

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip inklusif yakni melibatkan semua stakeholders dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan;

2. *Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty):*

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui Tourism Estate sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional;

3. *Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan:*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir;

4. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:*

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang; dan

5. *Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.*

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke kelima. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Gubernur Dan Wakil Gubernur

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	1. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Belum Efektifnya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah;	• Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan; • Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel; • Kurang meratanya infrastruktur teknologi; • Ketersediaan data	• Kerjasama teknokratik; • Kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder; • Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan; • Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan;
	Tujuan: Mewujudkan birokrasi yang profesional dan karakteristik adaptif, berintegritas,	3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	pembangunan dan penganggaran;	dan informasi dan kualitas hasil analisis data dan informasi belum mendukung proses perencanaan pembangunan;	• Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan; • Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM; • Perbaikan kelembagaan perencanaan;
	Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan; dan 6. Rendahnya inovasi daerah.	• Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; dan • Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan masih rendah.	• Adanya Majelis Pertimbangan sebagai pendorong internal; dan • Adanya BRIN sebagai pendorong eksternal.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Provinsi NTT

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Dari penjelasan tujuan diatas, adapun Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 8 (delapan) Indikator, yaitu :

1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi;
2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi;
3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia;

4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA;
5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi);
7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi) dan;
8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2018–2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2021	2022	2023	
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	%	NA	100	100	100	100
		2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	%	NA	100	100	100	100
		3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan	%	NA	100	100	100	100

		Pembangunan manusia						
		4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	NA	100	100	100	100
		5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	100	100	100	100
		6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	NA	62,86	82,86	100	100
		7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	NA	93,10	96,55	100	100
		8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	%	NA	30,00	60,00	100	100

2.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasarannya Bappelitbangda Provinsi NTT menetapkan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “*teknik*” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Bappelitbangda Provinsi NTT dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (*Strength*/kekuatan, *weakness*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, *threat*/tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda berdasarkan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018- 2023:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2018–2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Konsistensi penjabaran program-program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	Jumlah Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	Jumlah Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	Jumlah Konsistensi antar Dokumen Perencanaan
		2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan
		3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Jumlah dokumen kajian/analisis/rumusan/pedoman aspek Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Jumlah dokumen kajian/analisis/rumusan/pedoman aspek Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Jumlah dokumen kajian/analisis/rumusan/pedoman aspek Pemerintahan dan Pembangunan manusia

		4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek SDA	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek SDA	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek SDA
		5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen kajian/analisis/r umusan/pedom an aspek Infrastruktur dan Kewilayahan
		6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	Jumlah desiminasi dan advokasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi	Jumlah desiminasi dan advokasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi	Jumlah desiminasi dan advokasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi
		7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	Jumlah edukasi dan desiminasi ke seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota tentang Pergub Inovasi Daerah Provinsi NTT dan <i>Innovative Goverment Award</i>	Jumlah edukasi dan desiminasi ke seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota tentang Pergub Inovasi Daerah Provinsi NTT dan <i>Innovative Goverment Award</i>	Jumlah edukasi dan desiminasi ke seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota tentang Pergub Inovasi Daerah Provinsi NTT dan <i>Innovative Goverment Award</i>
		8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	Jumlah inovasi yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah inovasi yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah inovasi yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dalam proses pembenahan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah secara lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbangda tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappelitbangda Provinsi NTT sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu diintegrasikan dengan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan kapasitas perencanaan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel. Serta mewujudkan kapasitas lembaga kelitbang daerah yang berkualitas.

Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BP4D.050.13/Skr.69/03/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, yang telah disesuaikan dengan sasaran strategis sesuai Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang diacu

Tabel 2.4
Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang diacu					
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Total Jumlah Indikator RPJMD yang dijabarkan ke dalam dokumen RKPD ----- x 100 Total Jumlah Indikator RPJMD
		2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang diberikan kepada: Bidang Teknis Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT serta Kepala Perangkat Daerah Terkait ----- x 100 Total Hasil Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT
		3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia ----- x 100 Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang diacu					
		4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Kewilayahan	Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang SDA ----- x 100 Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang SDA
		5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Kewilayahan	Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ----- x 100 Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan dalam Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ----- x 100 Total Hasil Kelitbangan

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang diacu					
		7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ----- x 100 Total Hasil Inovasi Daerah yang dilakukan
		8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah inovasi dan/atau invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Perundang-Undangan ----- x 100 Total hasil inovasi dan/atau invensi yang dilakukan

2.5. Rencana Kinerja Dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

Pada awal tahun 2021, Bappelitbangda menetapkan RKT dan PK Tahun 2021. PK dan RKT yang disusun mengkaitkan Program yang dilaksanakan, output yang dihasilkan dengan Sasaran Strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023.

A. Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT pada satu tahun tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahunan 2021
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SEKRETARIAT			
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Selama 12 Bulan	1. Laporan Realisasi Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Dokumen
		2. Laporan Realisasi Semesteran Bappelitbangda	2 Dokumen
		3. Laporan Verifikasi SPJ Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen
		4. Penyediaan Rencana Pengembangan SDM Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen
		5. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah	77 Laporan
		6. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	14 Laporan
		7. Laporan Pengelola Website Bappelitbangda :	1 Laporan
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen
1. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2020 2. Dokumen LKPJ Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2020 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT	Terciptanya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang baik	5. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2022	1 Dokumen
		6. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1 Dokumen
		7. Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2022	1 Dokumen
		8. Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021	1 Dokumen
		9. Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2022 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	5 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TA.2020 4. Dokumen Perjanjian Kinerja BappelitbangdaProvinsi NTT (PK Murni) TA. 2021		10. Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	5 Dokumen
		11.	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
		12. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT (PK Perubahan) TA. 2021	1 Dokumen
		13. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2020	1 Dokumen
		14. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021	1 Dokumen
		15. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021	12 Laporan
		16. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021	4 Laporan
		17. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2021	1 Laporan
		18. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT	4 Dokumen
		19. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA			
1.	Persentase kesesuaian Penjabaran Indikator dan Target Program dan Kegiatan antar dokumen perencanaan dan Penganggaran RENSTRA/RPJMD, RENJA/RENSTRA, RENJA/RKPD, RKPD/KUA PPAS, KUA PPAS/RKA, RKA/DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	1. Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2. Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik 8 3. Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah 4. Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT 5. Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Pembentukan One Stop Service 6. Tersedianya laporan Pendampingan Lapangan Bersama DPRD Prov NTT dan Monev Tugas Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Lainnya 7. Terlaksananya Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT Tahun 2018-2023 8. Tersusunnya Laporan SDGs	1. 8 Universitas 2. 8 Dokumen 3. 6 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Rekomendasi 6. 86 Laporan 7. 1 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 3 Kali 10. 1 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Semesteran dan Tahunan	
		9. Terlaksananya Rapat Koordinasi/RapatPokja/Sekretariat SDGs	11. 7 Dokumen
		10. Tersusunnya Dokumen Pesebaran Fasilitas Pendidikan	12. 2 Dokumen
		11. Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD	13. 2 Dokumen 14. 2 Kali
		12. Tersedianya evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) lingkup pendidikan dan kesehatan	15. 1 Dokumen
		13. Terlaksananya Review dan Penilaian Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting	16. 1 Kali
		14. Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting	17. 12 Bulan 18. 1 Dokumen
		15. Terlaksananya Analisa dan Pemetaan Anggaran yang mendukung Percepatan Penangan Stunting masing-masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	19. 1 Dokumen 20. 1 Dokumen 21. 1 Dokumen
		16. Terlaksananya Diseminasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	22. 1 Kali
		17. Tersedianya Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur	23. 1 Dokumen 24. 2 Kali
		18. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	25. 2 Kali
		19. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	26. 1 Kali 27. 4 Triwulan
		20. Tersusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan	
		21. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan SPM Sosial	28. 4 Triwulan
		22. Terlaksananya Koordinasi di 13 Kabupaten Daerah Tertinggal dan 9 Kabupaten Daerah Terentass	
		23. Tersusunnya Profil Penyandang Disabilitas	
		24. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	
		25. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RPKD, LP2KD dan RAT	
		26. Terlaksananya Rapat Kelompok Pengelola Program TKPK Provinsi NTT	
		27. Tersedianya Operasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT	
		28. Tersedianya Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT	
BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
1.	Persentase kesesuaian Penjabaran Indikator dan Target Program dan Kegiatan antar dokumen perencanaan dan Penganggaran (RENSTRA/RPJMD, RENJA/RENSTRA, RENJA/RKPD, RKPD/KUA PPAS, KUA PPAS/RKA, RKA/DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup koordinasi bidang: - Perekonomian dan SDA - Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Terlaksananya Forum ekonomi bisnis antara pemerintah dan para pelaku bisnis (Masyarakat Ekonomi NTT) 2. Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi 3. Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 4. Asistensi Renja Murni, Pra RKA dan Renja Perubahan Perangkat daerah bidang keuangan dan jasa 6 OPD 5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa 6. Terlaksananya Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata ,Keuangan dan Jasa 7. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kolaborasi,Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 8. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota 9. Terlaksananya penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK 10. Terlaksananya rakor pembangunan bidang ekonomi produktif 11. Terlaksananya penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi 12. Terlaksananya Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD 13. Terlaksananya Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Benain Noelmina yang sesuai Sasaran RPJMD 14. Terlaksananya penyusunan laporan asistensi,sinkronisasi, dan koordinasi perencanaan bidang pertanian dan sumber daya alam 15. Terlaksananya penyusunan laporan monev terhadap dokumen	1. 1 Laporan 1. 1 Buku 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan 5. 16 Kabupaten 6. 1 Laporan 7. 1 Laporan 8. 22 Kab/Kota, Pusat 9. 15 Buku 10. 4 Kali 11. 10 Buku 12. 10 Buku 13. 15 Buku 14. 22 Buku 15. 10 Buku 16. 1 Dokumen 17. 234 Dokumen 18. 3 Dokumen 19. 1 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		perencanaan pembangunan dari PD Bidang Pertanian dan SDA 16. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP (Reimbursement) 17. Tersedianya Laporan Bulanan Kegiatan IPDMIP 18. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daerah Irigasi (DI) kesepakatan IPDMIP 19. Tersedianya Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD 20. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim PIU 21. Tersedianya Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD 22. Tersedianya Profil AMPL NTT Tahun 2020 23. Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan AMPL 24. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi AMPL di 22 Kabupaten/Kota 25. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni 6 OPD 26. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 6 OPD 27. Laporan Monitoring Perencanaan Pembangunan 6 OPD di 22 Kabupaten/Kota 28. Laporan Pelaksanaan Lembur Asistensi RKA 6 OPD 29. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Desa 30. Tersedianya Sistem Informasi Geografis berbasis Desa	20. 3 Dokumen 21. 1 Dokumen 22. 1 Dokumen 23. 3 Dokumen 24. 22 Dokumen 25. 6 Dokumen 26. 6 Dokumen 27. 22 Dokumen 28. 2 Dokumen 29. 1 Dokumen 30. 1 Sistem Informasi
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
1.	Persentase Penjabaran Indikator Program Strategis antar dokumen RPJMD ke RKPd Provinsi	1. Terlaksananya Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK	1. 2 Dokumen
2.	Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	2. Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	2. 1 dokumen
		3. Terlaksananya penyusunan dokumen persandingan indikator tujuan, sasaran dan program RPJMD dengan RPJMN	3. 1 dokumen
		4. Terlaksananya Rapat Forum PD	4. 1 Laporan
		5. Terlaksananya Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Prov	5. 2 Laporan
		6. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota	6. 1 dokumen
		7. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023	7. 1 dokumen
			8. 1 dokumen
			9. 1 dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		8. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD	10. 2 dokumen
		9. Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018 – 2023	11. 1 laporan 12. 1 dokumen
		10. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPd dan PergubPerubahan RKPd	13. 2 Edisi
		11. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT	14. 2 Edisi 15. 1 laporan
		12. Terlaksananya Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2021	16. 1 Laporan 17. 1 Web Base
		13. Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan	18. 1 Laporan
		14. Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan	19. 1 Laporan
		15. Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi	20. 1 Laporan 21. 1 dokumen
		16. Terlaksananya Rapat SIPPD	
		17. Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data	22. 22 kab/kota 23. 1 dokumen
		18. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota	
		19. Terlaksananya Konsultasi Pengendalian danEvaluasi Dokumen Perencanaan 2020	24. 1 kegiatan
		20. Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat	25. 1 kegiatan
		21. Terlaksananya Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota	26. 1 kegiatan 27. 1 kegiatan
		22. Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPd Provinsi dengan RKPd Kabupaten/kota	28. 1 laporan
		23. Terlaksananya Pengendalian dan EvaluasiTerhadap Pelaksanaan RKPd Kabupaten/kota	29. 22 kab/kota
		24. Terlaksananya bimtek operator pelaporan dana APBN melalui aplikasi PP 39 tahun 2006 lingkup Provinsi	30. 22 kab/kota
		25. Terlaksananya rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik	
		26. Terlaksananya sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	
		27. Terlaksananya lomba laporan perangkat daerah dan laporan	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		kab/kota terbaik 28. Terlaksananya Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun 29. Terlaksananya Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 30. Terlaksananya Sinkronisasi dan penyesuaian/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan	1. Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada erangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan /atau pengguna lainnya	1. 3 Dokumen
2.	Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap Tahun	2. Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan /atau pengguna lainnya	2. 4 Dokumen
3.	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun	3. Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan /atau pengguna lainnya	3. 5 Dokumen
	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap Tahun	4. Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah 5. Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 6. Inovasi yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah 7. Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 8. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan 9. e-LitBang 10. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 11. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi 12. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 13. Sinkronisasi Penyelenggaraan Kelitbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 14. Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 15. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 16. NTT Development Forum	4. 2 Aplikasi 5. 1 Kategori Skor 6. 1 Dokumen 7. 1 e – journal 8. 1 Metode 9. 1 Aplikasi 10. 2 Judul Buku 11. 1 Puspa Iptek 12. 1 Pergub 13. 1 Metode 14. 1 Metode 15. 5 Dokumen 16. 1 Dokumen

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur kepada Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT untuk melaksanakan program/kegiatan tahunan Bappelitbangda Tahun 2021 yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya (**Perjanjian Kinerja Kepala Badan s/d Eselon IV Terlampir**).

Untuk melakukan analisis kinerja sasaran Tahun 2021, Bappelitbangda Provinsi NTT menggunakan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahunan 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			TAHUN DASAR	TAHUN 2021			
1	2		3	4	5	6	7
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1.	Persentase Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPDP Provinsi	NA	100 %	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Menciptakan birokrasi yang profesional dan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	2.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPDP, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	100%			
	3.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPDP, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang	NA	100%			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			TAHUN DASAR	TAHUN 2021			
1	2		3	4	5	6	7
		: Sumber Daya Alam					
	4.	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Infrastruktur dan Kewilayahan.	NA	100%			
	5.	Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	NA	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.		
	6.	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap Tahun	NA	62,86 %			
	7.	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun	NA	93,10 %			
	8.	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap Tahun	NA	30,00			

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Provinsi NTT, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) Kepala Bappelitbangda yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah Gubernur Provinsi NTT. Untuk mencapai tujuan IKU tersebut, maka didukung oleh Program-program yang dikerjakan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT pada tahun 2021, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.876.494.702,-
2.	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.578.618.815,-
3.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 5.058.520.970,-
4.	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 883.203.900,-
Jumlah		Rp. 23.396.838.387,-

C. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai penerima amanah dan Gubernur sebagai pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi NTT dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

D. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja

1. Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT pada satu tahun tertentu;
2. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT untuk suatu tahun tertentu. Rencana Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan; dan
3. Sedangkan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Tahun 2021 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilaksanakan Bappelitbangda Provinsi NTT dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Bappelitbangda.

Capaian kinerja sasaran Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahunan 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Bappelitbangda Provinsi NTT beserta target, capaian dan realisasinya serta pelaksanaan indikator program/kegiatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya.

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT dilakukan dengan membandingkan rencana capaian dengan realisasi capaian kinerja dengan rumus perhitungan umum sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI CAPAIAN
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
4.	$X < 55\%$	Belum Berhasil

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021

Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang

diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Provinsi NTT pada tahun 2021 melalui 1 (Satu) sasaran strategis yang diukur dengan 8 (delapan) indikator sasaran. Target indikator kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT ini akan diukur dalam evaluasi kinerja tahun 2021 dan pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT tahun 2021, maka berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	Persen	100%	100%	100%
	2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	Persen	100%	100%	100%
	3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%	100%	100%
	4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Sumber Daya Alam	Persen	100%	100%	100%
	5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat	Persen	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
	Daerah Provinsi, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan				
	6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbang dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi)	Persen	62,86%	37,14%	59,08%
	7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	Persen	93,10%	100%	107,4%
	8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	Persen	30,00%	6,67%	22,23%
RATA – RATA CAPAIAN					86,09 %
KATEGORI					SANGAT BERHASIL

Sumber : Renstra 2018-2023 Bappelitbangda Provinsi NTT, PDE 2021

Berdasarkan Renstra Perubahan (Renstra-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) indikator sasaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 ada 2 (dua) yang tidak mencapai target dan 6 (enam) yang mencapai target. Sedangkan Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT tahun 2021 sebesar 86,09% (**SANGAT BERHASIL**) yang artinya tingkat capaian kinerja masih dibawah rata-rata dengan skala 100%, yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 59,08\% + 107,41\% + 22,23\%)/8 = 86,09\% \text{ (SANGAT BERHASIL)}$$

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dapat yaitu membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2021 Bappelitbangda Provinsi NTT telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target- target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 ada 2 (dua) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan. Hal ini berarti indikator sasaran tersebut belum optimal memenuhi target pencapaian walaupun ada beberapa indikator yang sudah mendekati target, sehingga untuk tahun berikutnya perlu dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program/kegiatan di indikator yang belum mencapai target. Dari pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan ada 6 (enam) indikator yang telah mencapai target. Keberhasilan beberapa indikator ini berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama dilingkungan internal Bappelitbangda Provinsi NTT yang dapat bersinergis dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Diharapkan dengan pencapaian kinerja di tahun 2021 ini, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan di Bappelitbangda Provinsi NTT tahun anggaran 2021 dapat dievaluasi kegagalan kinerja sehingga dapat diminimalisir dan agar mengacu kepada perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk tahun-tahun mendatang. Untuk itu perlu adanya aspek yang harus diperbaiki sebagai solusi, antara lain.

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Perlunya meningkatkan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan dalam upaya mengawal perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
3. Perlu menyediakan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan akurat yang dapat digunakan dalam perencanaan, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis digital;
4. Perlunya meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan yang dapat diaplikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; dan
5. Perlu meningkatkan kualitas aparat struktural, fungsional perencanaan dan fungsional peneliti dalam upaya membangun kreativitas dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra-P Bappelitbangda Provinsi NTT

Tahun 2018 – 2023

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra-P Bappelitbangda Provinsi

NTT Tahun 2018-2023 pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra-P
Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Sasaran		Indikator Sasaran		Capaian Tahun Lalu 2020 (%)	Tahun 2021				Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2023		
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Capaian kesesuaian program-program strategi daerah dalam dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	92	100%	100%	100%	100%	92%	100%
		3. Capaian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96	100%	100%	100%	100%	96%	100%
			4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD, PPAS,Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Sumber Daya Alam	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran		Indikator Sasaran		Capaian Tahun Lalu 2020 (%)	Tahun 2021				Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2023		
			5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Capaian Anugerah Pangripta Nusantara (APN)		100%	-	-	-	10%	100%	-
5. Meningkatnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilih		5. Capaian keterwakilan partisipasi publik terdapat berdasarkan gender pada tahapan perencanaan pembangunan daerah (30 % keterwakilan perempuan)		58%	-	-	-	90%	58%	-
		6. Capaian pemanfaatan data terpilih dalam perencanaan pembangunan		47%	-	-	-	90%	47%	-
		7. Capaian Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan		70%	-	-	-	100%	70%	-
6. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD;		8. Capaian proporsi pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai sasaran RPJMD		104%	-	-	-	95%	104%	-
7. Meningkatnya penjabaran outcome program prioritas dalam dokumen perencanaan PD		9. Capaian proporsi outcome program RPJMD dalam kegiatan-kegiatan Renja PD sesuai dengan Outcome program tahun berkenan		95%	-	-	-	95%	95%	-
8. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi pembangunan sektoral dan tematik		10. Capaian proporsi data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dari data yang dihasilkan		36%	-	-	-	100%	36%	-
9. Meningkatnya hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah;		11. Capaian proporsi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan	67	62,86%	37,14%	59,08%	100%	-	59,08%

Sasaran		Indikator Sasaran		Capaian Tahun Lalu 2020 (%)	Tahun 2021				Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2023		
			Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi)							
10. Meningkatkan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		12. Capaian proporsi kebijakan inovasi yang diterapkan dari inovasi yang dihasilkan	7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	86	93,10%	100%	93,10%	100%	-	107,4%
			8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun		30,00%	6,67%	22,23%	100%	-	22,23%
11. Meningkatkan kualitas SDM aparat struktural, fungsional perencana dan fungsional peneliti lingkup Bappelitbangda		13. Capaian proporsi keikutsertaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari pendidikan pelatihan yang direncanakan		111	-	-	-	100	111	-

Sumber : Renstra-P 2018-2023 Bappelitbangda Provinsi NTT, PDE 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator jauh dari angka target tahun akhir Renstra-P tahun 2023 yaitu: 1) Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi); 2) Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun. Sedangkan 5 (lima) indikator terlihat pencapaian pada tahun 2021 terhadap target akhir Renstra-P tahun 2023 sudah mencapai 100% atau nilai capaiannya sudah mencapai target dan 1 (satu) indikator sasaran mencapai 107,41 % atau nilai capaiannya melebihi target.

E. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja

Berikut disampaikan Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan Tahun 2021 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan) Tahun 2021
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2020	Tahun 2021	
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Capaian kesesuaian program-program strategi daerah dalam dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	65%	60%	100%	100%	92	100%	108
		3. Capaian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	96%	100%	100%	96%	100%	104
			4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Sumber Daya Alam	100%	96%	100%	100%	96%	100%	104

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan) Tahun 2021
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2020	Tahun 2021	
			5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan	100%	96%	100%	100%	96%	100%	104
		4. Capaian Anugerah Pangripta Nusantara (APN)		10	10			100		-
5. Meningkatnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah degan data terpilah		5. Capaian keterwakilan partisipasi publik terpih berdasarkan gender pada tahapan perencanaan pembangunan daerah (30 % keterwakilan perempuan)		60	35	-	-	58	-	-
		6. Capaian pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan pembangunan		75	35	-	-	47	-	-
		7. Capaian Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan		100	70	-	-	70	-	-
6. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD;		8. Capaian proporsi pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai sasaran RPJMD		75	83	-	-	104	-	-
7. Meningkatnya penjabaran outcome program prioritas dalam dokumen perencanaan PD		9. Capaian proporsioutcome program RPJMD dalam kegiatan-kegiatan Renja PD sesuai dengan Outcome program tahun berkenan		85	80	-	-	95	-	-
8. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi pemabngunan sektoral dan tematik		10. Capaian proporsi data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dari data yang dihasilkan		70	25	-	-	36	-	-
9. Meningkatnya hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah;		11. Capaian proporsi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan	6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi,	100	67	63%	37%	67	59 %	88

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan) Tahun 2021
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2020	Tahun 2021	
			2023 = 75 rekomendasi)							
10. Meningkatkan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		12. Capaian proporsi kebijakan inovasi yang dihasilkan	7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	100%	86%	93%	100%	86	107%	124
			8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	-	-	30%	6,7%	-	22%	22%
11. Meningkatkan kualitas SDM aparat struktural, fungsional perencana dan fungsional peneliti lingkup Bappelitbangda		13. Capaian proporsi keikutsertaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari pendidikan pelatihan yang direncanakan		90%	100%	-	-	111%	-	-

Sumber: Renstra-P Bappelitbangda tahun 2018-2023-PDE, 2021

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%-----Percepatan-Perlambatan : capaian kinerja 2021/Capaian 2020 X100%

Tingkat Capaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa dari 8 (delapan) indikator sasaran dengan capaian indikator yang mengalami percepatan 6 (enam) indikator sasaran, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran mengalami perlambatan. Dari 2 (dua) indikator sasaran yang capaian indikatornya mengalami perlambatan, yaitu: 1) Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbang dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi); 2) Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun. Indikator sasaran yang mengalami Perlambatan ini karena capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi dari capaian tahun 2021 atau realisasi lebih rendah dari target/kenaikan belum mencapai 100% dan atau indikator sasaran pada tahun 2020 tidak ada dan merupakan indikator sasaran baru di tahun 2021.

Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang akan memudahkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang, sehingga kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

F. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021

Berikut disampaikan Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021 pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Capaian %	Nama Progam/Kegiatan	Keuangan Tahun 2021				
		Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisien	Tingkat Efektifitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	Persen	100%	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah/	1,578,618,815	1,110,846,238	70.37	29,63	142,11
	2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi		100%	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah/	1,578,618,815	1,110,846,238	70.37	29,63	142,11
	3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100%	100%	100%	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,111,419,520	1,488,790,330	70.51	29,49	141,82
	4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Sumber Daya Alam		100%	100%	100%	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	662,299,100	406,823,270	61.43	38,57	162,79
	5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	100%	100%	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2,284,802,350	1.739.401.436	76,13	28,77	131,35
	6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbang dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi)	Persen	62,86%	37,14%	59,08%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	406,001,990	105,182,760	27,17	31,91	217,45
	7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	Persen	93,10%	100%	107,41%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	477,201,910	176,358,700	36.96	70,44	290,61
	8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	Persen	30,00%	6,67%	22,23%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	12,430,260	5,000,000	40.22	(17,99)	55,27

Sumber: PDE Bappelitbangda, 2021

Ket : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator x 100%

Tingkat efisiensi : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) – Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda Provinsi NTT sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian cukup memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 90% - $\geq 100\%$, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran tinggi, yaitu indikator dengan Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi) dengan tingkat efisiensi 70,44%. Hal ini terjadi karena kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam penyediaan inovasi daerah yang dihasilkan dari incubator inovasi daerah. Anggaran pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses asistensi, sinkronisasi dan koordinasi dengan tahapan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dengan perangkat daerah. Untuk persentase dokumen perencanaan yang didukung data yang akurat, ditargetkan sesuai dengan kondisi ideal, yaitu 100%, sehingga Bappelitbangda tidak banyak mengeluarkan anggaran dalam proses penjabaran program.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu: Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun. Dari indikator tersebut secara capaian kinerja belum melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan belum seluruhnya direalisasikan. Artinya pada pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut anggarannya tidak terserap.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat indikator yang dianggap kurang optimal yaitu: 1) Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun dengan tingkat efisiensi (17,99) dan tingkat efektivitas 55,27. Kurang optimal dikarenakan pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan, sedangkan dari sisi penyerapan anggaran lebih tinggi persentasenya dari capaian kinerja. Artinya bahwa ada beberapa program/kegiatan bukan berarti tidak efektif/efisien, tetapi realisasinya belum bisa diukur dalam jangka pendek.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappelitbangda Provinsi NTT secara umum dari 8 (delapan) indikator sasaran, target bisa dicapai secara baik, artinya masih ada beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra-P) dan dokumen perencanaan

tahunan (Renja). Namun ada indikator sasaran yang realisasinya telah mencapai target, maka keberhasilan tersebut disebabkan oleh:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Sasaran yang ditetapkan sudah menggunakan indikator dan capaian yang terukur;
3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program/kegiatan; dan
4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kekurangan dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan monitoring sebagai salah satu tahapan perencanaan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah;
2. Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan; dan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dan inovasi.

3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) indikator Kinerja. Dari ke 8 (delapan) indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT sampai tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT tahun 2021 sebesar 86,09% yaitu masuk pada kategori SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bappelitbangda tahun 2021 telah tercapai.

Kesimpulan dari hasil analisis Capaian Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Bappelitbangda Provinsi NTT 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran pertama:** Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

Penilaian dan evaluasi capaian kinerja sasaran pertama diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang hasilnya dapat dilihat dibawah ini:

- a. **Capaian Persentase Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi dengan rumus perhitungan :**

$\frac{\Sigma \text{ Total Jumlah Indikator RPJMD yang Dijabarkan kedalam dokumen RKPD}}{\Sigma \text{ Total Jumlah Indikator RPJMD}} \times 100$

Persentase Konsistensi Penjabaran Program–Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi dengan target Tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, Pencapaian 100% ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat website <https://nttprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/sebagaimana> merupakan implementasi dari Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mana secara otomatis rumusan perhitungan kesesuaian Program–Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi secara otomatis langsung tersesuaikan dan ditindaklanjuti serta disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Lembaran Daerah nomor 006 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Nomor Registrasi PERDA Provinsi NTT : (6-203/2021) pada Lampiran VIII. Hal ini berdampak juga terhadap capaian indikator :

- 1) Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam;
- 3) Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- b. **Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dengan rumus perhitungan :**

$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Yang diberikan kepada Bidang Teknis Perencanaan Dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT serta Kepala Perangkat Daerah Terkait}}{\Sigma \text{ Total Hasil Pengendalian dan Evaluasi Yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT}} \times 100$

Berkaitan dengan Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dapat disampaikan bahwa selama periode Tahun 2021, dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021, Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi tersebut dilakukan oleh Bappelitbangda Provinsi NTT dengan melakukan penyampaian Instrument Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra PD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Hasil pengendalian dan evaluasi ini juga menjadi bahan dalam penyusunan Bab III dan Bab IV dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Gubernur Nusa Tenggara Timur) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dari Target Tahun 2021 sebesar 100% atau terealisasi sebesar 100% dengan capaian adalah 100%

- c. Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan rumus perhitungan :**

$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}{\Sigma \text{ Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi bidang : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}} \times 100$
--

Dengan adanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Implementasi Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah dengan alamat website <https://www.bappelitbangda.go.id>:

//nttprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/, maka Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara otomatis langsung tersesuaian dan ditindaklanjuti serta disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Lembaran Daerah nomor 006 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Nomor Registrasi PERDA Provinsi NTT :(6-203/2021) pada Lampiran VIII. Sehingga dari Target Tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%

4. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Sumber Daya Alam dengan rumus perhitungan :

$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup bidang Sumber Daya Alam}}{\Sigma \text{ Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi bidang: Sumber Daya Alam}} \times 100$
--

Dengan adanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Implementasi Permendagri 70 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan alamat website <https://nttprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/>, maka Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Sumber Daya Alam secara otomatis langsung tersesuaian dan ditindaklanjuti serta disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Lembaran Daerah nomor 006 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Nomor Registrasi PERDA Provinsi NTT : (6-203/2021) pada Lampiran VIII. Sehingga dari Target Tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

5. **Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS, Renstra,Renja,RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rumus perhitungan :**

$$\frac{\sum \text{Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,PPAS Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}{\sum \text{Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan(RPJMD,RKPD,PPAS,Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi}} \times 100$$

Dengan adanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Implementasi Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan alamat website <https://nttprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/>, maka Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang : Infrastruktur dan Kewilayahan secara otomatis langsung tersesuaikan dan ditindaklanjuti serta disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Lembaran Daerah nomor 006 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Nomor Registrasi PERDA Provinsi NTT : (6-203/2021) pada Lampiran VIII. Sehingga dari Target Tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

6. **Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap Tahun dengan rumus perhitungan :**

$$\frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan hasil penelitian dan Pengembangan}}{\sum \text{Total Hasil Kelitbangan}} \times 100$$

Berkaitan dengan pencapaian Persentase Cakupan Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi, Indikator Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan, di tahun 2021 dari target sebesar 62,85% terealisasi 37,14%. Masih belum signifikan realisasinya dikarenakan reffocusing anggaran yang dilaksanakan serta pengajuan pencairan yang terkendala pada

Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian 37,14% ini didapat dari rekomendasi kegiatan penunjang pengembangan rumput laut menjadi pangan fungsional. Dimana hasil dari rekomendasi kegiatan penunjang pengembangan rumput laut menjadi pangan fungsional tersebut digunakan dalam pemberdayaan Petani Rumput Laut di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.

Permasalahan dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target indikator program kurang terukur;
2. Program/kegiatan tidak mendukung tercapainya sasaran kinerja;
3. Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang lptekin;
5. Belum adanya tenaga fungsional perekayasa; dan
6. Belum adanya tenaga fungsional peneliti tingkat madya dan utama.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penetapan indikator program dilakukan secara bersama-sama antara Bappelitbangda Provinsi NTT dengan Perangkat Daerah lainnya sehingga target terukur *dan achievable*;
2. Harus dilakukan penyesuaian program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya sasaran kinerja;
3. Untuk mendukung pencapaian indikator hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari pihak eksternal, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi Pemerintah Provinsi NTT maupun pihak akademisi dan peneliti guna meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian atau kajian dalam penentuan perencanaan pembangunan; dan
4. harus dapat meningkatkan pemanfaatan hasil analisis data dalam merumuskan setiap kebijakan baik dalam lingkup perencanaan jangka pendek, jangka menengah atau pun jangka panjang.

7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun:

$$\frac{\Sigma \text{Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Penelitian dan Pengembangan}}{\Sigma \text{Total Hasil Inovasi Daerah yang dilakukan}} \times 100$$

Untuk Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya hingga akhir pelaksanaan mencapai 107 %, dimana pada Tahun 2021 secara keseluruhan Pemerintah Provinsi menghasilkan Jenis Inovasi Digital sebanyak 89 dan yang disetujui sebanyak 31 serta Jenis Inovasi Non Digital sebanyak 127 dan yang disetujui sebanyak 28. Adapun dari total inputan hasil inovasi yang masuk dalam website <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id> milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI. Untuk Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan skor indeks 53,38 dengan kategori Inovatif dan berada pada posisi 12 dari 415 Pemerintah Daerah se-Indonesia.

8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap Tahun dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\Sigma \text{Jumlah inovasi dan/atau invensi Yang mendapatkan perlindungan kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Perundang - Undangan}}{\Sigma \text{Total Hasil Inovasi dan/atau Invensi Yang dilakukan}} \times 100$$

Untuk Indikator Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada tahun 2021, dari target 30,00% atau realisasi sebesar 6,67 dengan capaian sebesar 22,23%. Masih belum signifikan realisasinya dikarenakan refocusing anggaran yang dilaksanakan serta pengajuan pencairan yang terkendala pada Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian sebesar 22,23% di Tahun 2021 didapat dari 1 Dokumen Fasilitasi HAKI oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung, maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bappelitbangda Provinsi NTT, mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang pengelolaannya mengacu pada DPA dan DPPA.

3.2.1. Analisis Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari APBD TA. 2021

Realisasi anggaran belanja Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2021 sebesar Rp.19.702.870.175,00 atau 84,21% dari target sebesar Rp. 23.396.838.387,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 19.412.985.247,00 atau 84,57% dari target sebesar Rp. 22.954.206.059,00, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.069.651.161,00 atau 97,16% dari target Rp. 12.422.607.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.343.334.086,00 atau 69,73% dari target Rp. 10.531.599.059,00;
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.289.884.928,00 atau 65,49% dari target sebesar Rp.442.632.328,00, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp. 257.798.600,00 atau 62,79% dari target Rp. 410.546.000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 32.086.328,00 atau 100% dari target Rp. Rp. 32.086.328,00.

Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 3.693.968.212,00 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 3.541.220.812,00 dan belanja modal sebesar Rp. 152.747.400,00. Rincian realisasi tahun anggaran 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran APBD TA. 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
BELANJA OPERASI	22.954.206.059,00	19.412.985.247,00	84,57	3.541.220.812,00	15,43
Belanja Pegawai	12.422.607.000,00	12.069.651.161,00	97,16	352.955.839,00	2,84
Barang dan Jasa	10.531.599.059,00	7.343.334.086,00	69,73	3.188.264.973,00	30,27
BELANJA MODAL	442.632.328,00	289.884.928,00	65,49	152.747.400,00	34,51
Belanja Peralatan dan Mesin	410.546.000,00	257.798.600,00	62,79	152.747.400,00	37,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.086.328,00	32.086.328,00	100	-	-
JUMLAH BELANJA	23.396.838.387,00	19.702.870.175,00	84,21	3.693.968.212,00	15,79

Sumber: PDE Bappelitbangda, 2021

A. Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021

Tingkat Efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Dengan rumus perhitungannya:

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan **sangat efektif**;
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan **efektif**;
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80 - 90%, maka anggaran belanja dikatakan **cukup efektif**;
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60 – 80%, maka anggaran belanja dikatakan **kurang efektif**;
- 5) Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan **tidak efektif**.

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efektifitas Anggaran	SISA ANGGARAN	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23,396,838,387.00	19,702,870,175.00	84.21	Cukup Efektif	3,693,968,212.00	15.79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,876,494,702.00	14,675,467,441.00	92.44	Efektif	1,201,027,261.00	7.56
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612,631,432.00	398,794,420.00	65.10	Kurang Efektif	213,837,012.00	34.90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189,669,700.00	119,108,700.00	62.80	Kurang Efektif	70,561,000.00	37.20
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80,992,700.00	3,857,700.00	4.76	Tidak Efektif	77,135,000.00	95.24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	77,652,550.00	60,537,550.00	77.96	Kurang Efektif	17,115,000.00	22.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0.00	-	-	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	0.00	-	-	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108,045,970.00	104,085,970.00	96.33	Efektif	3,960,000.00	3.67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156,270,512.00	111,204,500.00	71.16	Kurang Efektif	45,066,012.00	28.84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,157,319,860.00	12,822,904,501.00	97.46	Efektif	334,415,359.00	2.54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,338,627,000.00	12,008,571,161.00	97.33	Efektif	330,055,839.00	2.67
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	818,692,860.00	814,333,340.00	99.47	Efektif	4,359,520.00	0.53
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260,462,000.00	256,593,420.00	98.51	Efektif	3,868,580.00	1.49
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	232,937,760.00	232,329,180.00	99.74	Efektif	608,580.00	0.26
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27,524,240.00	24,264,240.00	88.16	Cukup Efektif	3,260,000.00	11.84
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,073,920.00	127,734,620.00	94.57	Efektif	7,339,300.00	5.43
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	29,293,920.00	29,293,920.00	100.00	Efektif	-	0.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98,180,000.00	91,540,700.00	93.24	Efektif	6,639,300.00	6.76
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,600,000.00	6,900,000.00	90.79	Efektif	700,000.00	9.21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	668,954,940.00	277,275,900.00	41.45	Tidak Efektif	391,679,040.00	58.55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,555,200.00	12,924,300.00	69.65	Kurang Efektif	5,630,900.00	30.35

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efektifitas Anggaran	SISA ANGGARAN	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,586,940.00	34,586,500.00	100.00	Efektif	440.00	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,596,800.00	7,412,500.00	42.12	Tidak Efektif	10,184,300.00	57.88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	598,216,000.00	222,352,600.00	37.17	Tidak Efektif	375,863,400.00	62.83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0.00	-	-	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0.00	-	-	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648,859,630.00	504,243,420.00	77.71	Kurang Efektif	144,616,210.00	22.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,600,000.00	9,000,000.00	71.43	Kurang Efektif	3,600,000.00	28.57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	464,824,050.00	357,968,940.00	77.01	Kurang Efektif	106,855,110.00	22.99
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,350,720.00	65,340,500.00	99.98	Efektif	10,220.00	0.02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106,084,860.00	71,933,980.00	67.81	Kurang Efektif	34,150,880.00	32.19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,192,920.00	287,921,160.00	73.23	Kurang Efektif	105,271,760.00	26.77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251,519,920.00	206,801,160.00	82.22	Cukup Efektif	44,718,760.00	17.78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,753,000.00	23,500,000.00	34.18	Tidak Efektif	45,253,000.00	65.82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72,920,000.00	57,620,000.00	79.02	Kurang Efektif	15,300,000.00	20.98
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,578,618,815.00	1,110,846,238.00	70.37	Kurang Efektif	467,772,577.00	29.63
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	880,071,688.00	680,077,220.00	77.28	Kurang Efektif	199,994,468.00	22.72
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	121,814,720.00	111,243,060.00	91.32	Efektif	10,571,660.00	8.68
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	75,608,370.00	64,910,150.00	85.85	Cukup Efektif	10,698,220.00	14.15
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	138,008,563.00	115,006,000.00	83.33	Cukup Efektif	23,002,563.00	16.67
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	544,640,035.00	388,918,010.00	71.41	Kurang Efektif	155,722,025.00	28.59

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efektifitas Anggaran	SISA ANGGARAN	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	593,724,327.00	407,572,478.00	68.65	Kurang Efektif	186,151,849.00	31.35
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25,019,130.00	5,575,000.00	22.28	Tidak Efektif	19,444,130.00	77.72
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	519,549,047.00	397,975,328.00	76.60	Kurang Efektif	121,573,719.00	23.40
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	49,156,150.00	4,022,150.00	8.18	Tidak Efektif	45,134,000.00	91.82
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	104,822,800.00	23,196,540.00	22.13	Tidak Efektif	81,626,260.00	77.87
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	32,289,720.00	2,265,540.00	7.02	Tidak Efektif	30,024,180.00	92.98
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	39,990,780.00	20,931,000.00	52.34	Tidak Efektif	19,059,780.00	47.66
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32,542,300.00	-	0.00	-	32,542,300.00	100.00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,058,520,970.00	3,635,015,036.00	71.86	Kurang Efektif	1,423,505,934.00	28.14
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,111,419,520.00	1,488,790,330.00	70.51	Kurang Efektif	622,629,190.00	29.49
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	0.00	-	-	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	101,658,680.00	88,837,680.00	87.39	Cukup Efektif	12,821,000.00	12.61
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	0.00	-	-	0.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129,100,700.00	79,741,700.00	61.77	Kurang Efektif	49,359,000.00	38.23
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59,720,000.00	46,910,000.00	78.55	Kurang Efektif	12,810,000.00	21.45
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	883,875,580.00	600,377,670.00	67.93	Kurang Efektif	283,497,910.00	32.07

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efektifitas Anggaran	SISA ANGGARAN	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	937,064,560.00	672,923,280.00	71.81	Kurang Efektif	264,141,280.00	28.19
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	662,299,100.00	406,823,270.00	61.43	Kurang Efektif	255,475,830.00	38.57
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,085,300.00	107,999,300.00	53.98	Tidak Efektif	92,086,000.00	46.02
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	34,889,360.00	23,969,360.00	68.70	Kurang Efektif	10,920,000.00	31.30
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	57,776,150.00	4,747,150.00	8.22	Tidak Efektif	53,029,000.00	91.78
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	281,909,390.00	217,483,640.00	77.15	Kurang Efektif	64,425,750.00	22.85
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	59,377,320.00	49,062,320.00	82.63	Cukup Efektif	10,315,000.00	17.37
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,261,580.00	3,561,500.00	12.60	Tidak Efektif	24,700,080.00	87.40
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2,284,802,350.00	1,739,401,436.00	76.13	Kurang Efektif	545,400,914.00	23.87
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,025,028,370.00	1,622,906,736.00	80.14	Cukup Efektif	402,121,634.00	19.86
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28,868,320.00	7,128,000.00	24.69	Tidak Efektif	21,740,320.00	75.31
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	230,905,660.00	109,366,700.00	47.36	Tidak Efektif	121,538,960.00	52.64
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	883,203,900.00	281,541,460.00	31.88	Tidak Efektif	601,662,440.00	68.12
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	222,279,840.00	31,001,460.00	13.95	Tidak Efektif	191,278,380.00	86.05
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	222,279,840.00	31,001,460.00	13.95	Tidak Efektif	191,278,380.00	86.05
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	183,722,150.00	74,181,300.00	40.38	Tidak Efektif	109,540,850.00	59.62
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	183,722,150.00	74,181,300.00	40.38	Tidak Efektif	109,540,850.00	59.62

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efektifitas Anggaran	SISA ANGGARAN	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	477,201,910.00	176,358,700.00	36.96	Tidak Efektif	300,843,210.00	63.04
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	0.00	-	-	0.00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	315,062,200.00	94,900,000.00	30.12	Tidak Efektif	220,162,200.00	69.88
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	149,709,450.00	76,458,700.00	51.07	Tidak Efektif	73,250,750.00	48.93
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	12,430,260.00	5,000,000.00	40.22	Tidak Efektif	7,430,260.00	59.78
JUMLAH	23,396,838,387.00	19,702,870,175.00	84.21	Cukup Efektif	3,693,968,212.00	15.79

B. Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Dengan rumus perhitungannya:

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG}}{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}} \times 100$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien;
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien;
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80 - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien;
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60 – 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien;
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (DILUAR GAJI DAN TUNJANGAN PNS)	CAPAIAN (%)	Tingkat Efisiensi Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19,702,870,175.00	7,694,299,014.00	39.05	Sangat Efisien

C. Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021

Dari Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa, dari 4 (empat) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dapat dilihat bahwa pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tingkat efisiensi berada pada nilai (25,09)%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja sebesar 67,35 % sedangkan capaian anggaran sebesar 92,44 % sehingga capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dari jumlah anggaran yang digunakan. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	67.35%	67.35%	15,876,494,702	14.675.467.441	92.44%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		67.35%	Total Capaian Anggaran		92.44%
		Tingkat Efisiensi : (25.09)% Tingkat Efektivitas : 72,86%					
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	94.29%	94.29%	612,631,432	398,794,420	65.10%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		94.29%	Total Capaian Anggaran		65.10%
		Tingkat Efisiensi : 29.20% Tingkat Efektivitas : 144.85%					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100	100%	189,669,700	119,108,700	62.80%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100	100%	80,992,700	3,857,700	4.76%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100	100%	77,652,550	60,537,550	77.96
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100	100%	0.00	0.00	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100	100%	0.00	0.00	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100	100%	108,045,970	104,085,970	96.33%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	60.00%	60.00%	156,270,512	111,204,500	71.16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13,157,319,860	12.822.904.501	97.46%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		100%	Total Capaian Anggaran		97.46%
		Tingkat Efisiensi : 2,45% Tingkat Efektivitas : 102,61%					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	12,338,627,000	12,008,571,161	97.33%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	100%	100%	818,692,860	814.333.340	99.47%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80.00%	80.00%	260,462,000	256,593,420	98.51%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		80.00%	Total Capaian Anggaran		98.51%

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	
		Tingkat Efisiensi : (18,51) % Tingkat Efektivitas : 81,21%					
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		100%	100%	100%	232,937,760	232,329,180	99.74%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	60.00%	60.00%	27,524,240	24,264,240	88.16%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	67%	67%	135,073,920	127,734,620	94.57%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		67%	Total Capaian Anggaran		94.57%
		Tingkat Efisiensi : (27,57) % Tingkat Efektivitas : 70,85%					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		100%	100	100%	29,293,920	29,293,920	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100%	50.00%	50.00%	98,180,000	91,540,700	93.24%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	50.00%	50.00%	7,600,000	6,900,000	90.79%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	54.94%	54.94%	668,954,940	277,275,900	41.45%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		54.94%	Total Capaian Anggaran		41.45%
		Tingkat Efisiensi : 13,49% Tingkat Efektivitas : 132,55%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	59.90%	59.90%	18,555,200	12,924,300	69.65%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	34,586,940	34,586,500	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	41.67%	41.67%	17,596,800	7,412,500	42.12%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	18.18%	18.18%	598,216,000	222,352,600	37.17%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%	0	0	0.00%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		0%	Total Capaian Anggaran		0.00%
		Tingkat Efisiensi : 0% Tingkat Efektivitas : 0%					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	0%	0%	0	0	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.93%	83.93%	648,859,630	504,243,420	77.71%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		83.93%	Total Capaian Anggaran		77.71%
		Tingkat Efisiensi : 6,22% Tingkat Efektivitas : 108,00%					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	35.70%	35.70%	12,600,000	9,000,000	71.43%

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	464,824,050	357,968,940	77.01%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	65,350,720	65,340,500	99.98%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	106,084,860	71,933,980	67.81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Bappelitbangda Provinsi NTT	100%	59.01%	59.01%	393,192,920	287,921,160	73.23%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		59.01%	Total Capaian Anggaran		73.23%
		Tingkat Efisiensi : (14,22) % Tingkat Efektivitas : 80,58%					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	251,519,920	206,801,160	82.22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	34.18%	34.18%	68,753,000	23,500,000	34.18%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	42.85%	42.85%	72,920,000	57,620,000	79.02%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	100%	68.52%	68.52%	1,578,618,815	1,110,846,238	70.37%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		68.52%	Total Capaian Anggaran		70.37%
		Tingkat Efisiensi : (1,85) % Tingkat Efektivitas : 97,37%					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	91.67%	91.67%	880,071,688	680,077,220	77.28%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		91.67%	Total Capaian Anggaran		77.28%
		Tingkat Efisiensi : 14,39% Tingkat Efektivitas : 118,62%					
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen		100%	100%	100%	121,814,720	111,243,060	91.32%
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		100%	100%	100%	75,608,370	64,910,150	85.85%
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Prov	100%	100%	100%	138,008,563	119,581,000	86.65%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		100%	66.67%	66.67%	544,640,035	384,343,010	70.57%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	36%	36%	593,724,327	407,572,478	68.65%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		36%	Total Capaian Anggaran		68.65%
		Tingkat Efisiensi : (32,65) % Tingkat Efektivitas : 52,44%					
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	0%	0%	25,019,130	5,575,000	22.28%

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %	
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		100%	75.00%	75.00%	519,549,047	397,975,328	76.60%	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		100%	33.33%	33.33%	49,156,150	4,022,150	8.18%	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	77.78%	77.78%	104,822,800	23,196,540	22.13%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja			77.78%	Total Capaian Anggaran		22.13%
		Tingkat Efisiensi : 55,65% Tingkat Efektivitas : 351,47%						
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		100%	33.33%	33.33%	32,289,720	2,265,540	7.02%	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	39,990,780	20,931,000	52.34%	
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100%	32,542,300	0	0.00%	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi,	100%	68.75%	68.75%	5,058,520,970	3.635.015.036	71,86%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja			68.75%	Total Capaian Anggaran		71,86%
		Tingkat Efisiensi : (3,11) Tingkat Efektivitas : 95,67						
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	58.69%	58.69%	2,111,419,520	1,488,790,330	70.51%	
		Rata-Rata Capaian Kinerja			58.69%	Total Capaian Anggaran		70.51%
		Tingkat Efisiensi : (11,82) % Tingkat Efektivitas : 83,24%						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%	0%	0%	0	0	0.00%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		100%	100%	100%	101,658,680	88,837,680	87.39%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		100%	0%	0%	0	0	0.00%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%	50.00%	50.00%	129,100,700	79,741,700	61.77%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100%	100%	100%	59,720,000	46,910,000	78.55%	

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100%	90.00%	90.00%	883,875,580	600,377,670	67.93%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		100%	70.83%	70.83%	937,064,560	672,923,280	71.81%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	70.28%	70.28%	662,299,100	406,823,270	61.43%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		70.28%	Total Capaian Anggaran		61.43%
		Tingkat Efisiensi : 8,85% Tingkat Efektivitas : 114,41%					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%	80.00%	80.00%	200,085,300	107,999,300	53.98%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	34,889,360	23,969,360	68.70%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		100%	66.67%	66.67%	57,776,150	4,747,150	8.22%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%	75.00%	75.00%	281,909,390	217,483,640	77.15%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		100%	100%	100%	59,377,320	49,062,320	82.63%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA		100%	0%	0%	28,261,580	3,561,500	12.60%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	77.27%	77.27%	2,284,802,350	1.739.401.436	76,13%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		77.27%	Total Capaian Anggaran		76,13%
		Tingkat Efisiensi : 1,14% Tingkat Efektivitas : 101,50%					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		100%	81.82%	81.82%	2,025,028,370	1.622.906.736	80,14%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		100%	100%	100%	28,868,320	7,128,000	24.69%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		100%	50.00%	50.00%	230,905,660	109,366,700	47.36%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kab/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka	100%	11.11%	11.11%	883,203,900	281,541,460	31.88%

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Anggaran 2021		Capaian Keuangan %
		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi	
	penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah						
		Rata-Rata Capaian Kinerja		11.11%	Total Capaian Anggaran		31.88%
		Tingkat Efisiensi : (20,77) % Tingkat Efektivitas : 34,85%					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan BidangSosial dan Kependudukan	100%	0%	0%	222,279,840	31,001,460	13.95%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		0%	Total Capaian Anggaran		13.95%
		Tingkat Efisiensi : (13,95) % Tingkat Efektivitas : 0%					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		100%	0%	0%	222,279,840	31,001,460	13.95%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Penelitian dan PengembanganBidangEkonomi dan Pembangunan	100%	25.00%	25.00%	183,722,150	74,181,300	40.38%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		25.00%	Total Capaian Anggaran		40.38%
		Tingkat Efisiensi : (15,38) % Tingkat Efektivitas : 61,91%					
Penelitian dan PengembanganPertanian, Perkebunan dan Pangan		100%	25.00%	25.00%	183,722,150	74,181,300	40.38%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Hasil PengembanganInovasi dan Teknologi	100%	8.33%	8.33%	477,201,910	176,358,700	36.96%
		Rata-Rata Capaian Kinerja		8.33%	Total Capaian Anggaran		36.96%
		Tingkat Efisiensi : (28,63) % Tingkat Efektivitas : 22,54%					
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		100%	0%	0%	0	0	0%
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		100%	0%	0%	315.062.200	94.900.000	30,12%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		100%	33.33%	33.33%	149,709,450	76,458,700	51.07%
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		100%	0%	0%	12,430,260	5,000,000	40.22%

BAB IV

PENUTUP

1.5. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang diperoleh, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dikategorikan BAIK. Kategori BAIK tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 73%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2021 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya *Performance Management System/PMS*) di lingkungan Bappelitbangda Provinsi NTT.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Bappelitbangda Provinsi NTT, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja di tahun-tahun mendatang.

1.6. Tindak Lanjut

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah tersebut melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappelitbangda Provinsi NTT, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya; dan
4. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra-P Bappelitbangda 2018-2023.

LAMPIRAN